

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015**  
**KABUPATEN PURWOREJO**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>SOSIAL</b>		
	1. Menurunnya angka kemiskinan	1. Turunnya angka kemiskinan/tingkat kemiskinan	11,83%
	2. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Prosentase proporsi PMKS terhadap jumlah penduduk	5%
<b>2.</b>	<b>KETENAGAKERJAAN</b>		
	1. Menurunnya angka kemiskinan	1. Turunnya jumlah pengangguran (orang)	12.251
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4%
<b>3.</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>		
	1. Meningkatnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Tingkat swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pertumbuhannya meningkat (dari nilai hibah/bantuan)	15%
		2. Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa	469
	2. Meningkatnya inovasi dan kreativitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1. Temuan inovasi dan kreativitas masyarakat pertumbuhannya meningkat	50%
	3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang pemerintahan dan pembangunan di desa	1. Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbangdes	30%
		2. Desa/Kelurahan yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Desa (RPJMD-Des)	469

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
		3. Prosentase ketertiban administrasi pemerintahan desa (hasil lomba desa)	100%
<b>4.</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
	1. Meningkatnya kesetaraan gender (GDI)	1. Ketimpangan antara IPM dan IPG	73/65
		2. IPG	65
	2. Meningkatnya perlindungan keamanan terhadap perempuan dan anak	1. Prosentase tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	100%
<b>5.</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>		
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Berkurangnya Jumlah keluarga sejahtera I (KS I) dan keluarga pra sejahtera (pra KS)	41%
		2. Berkurangnya Jumlah keluarga pra sejahtera (pra KS)	15%
		3. Prosentase partisipasi aktif masyarakat dalam ber KB	80%
<b>6.</b>	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>		
	1. Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM	1. Prosentase bagian laba BUMD	25% (2,79M)
		2. Prosentase jumlah koperasi sehat	75%
		3. Prosentase peningkatan jumlah UMKM	10%
<b>7.</b>	<b>KETRANSMIGRASIAN</b>		
	1. Menurunnya angka kemiskinan	1. Jumlah keluarga miskin yang bertransmigrasi	45%
<b>8.</b>	<b>PENDIDIKAN</b>		
	1. Meningkatnya pemerataan dan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) :	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
	perluasan akses memperoleh kesempatan pendidikan (Ketersediaan, Keterjangkauan, dan Kesetaraan Pendidikan)	a. APK PAUD formal b. APK SD/MI/Paket A c. APK SMP/MTs/Paket B d. APK SMA/SMK/MA/Paket C	61% 102% 100% 65%
		2. Angka Partisipasi Murni (APM) : a. APM PAUD formal b. APM SD/MI/Paket A c. APM SMP/MTs/ Paket B d. APM SMA/SMK/MA/Paket	61% 95% 78,8% 50%
	2. Meningkatnya mutu relevansi dan daya saing pendidikan (Kualitas mutu & relevansi serta Kesetaraan Pendidikan)	1. Rasio layanan tenaga pendidik berkualifikasi S1/D4 : a. Jenjang PAUD b. Jenjang SD/SDLB c. Jenjang SMP/SMPLB d. Jenjang SMA/SMK/SMALB	85% 88% 98% 98%
		2. Rasio layanan tenaga pendidik telah bersertifikasi a. Jenjang PAUD b. Jenjang SD/SDLB c. Jenjang SMP/SMPLB d. Jenjang SMA/SMK/SMALB	85% 80% 90% 90%
		3. Angka melek huruf	100%
		3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	9
		5. Ketersediaan kurikulum nasional dan lokal	100,00%
		6. Keterlaksanaan kurikulum nasional dan lokal	100,00%
		7. Angka putus sekolah maksimal : a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB	0,01% 0,05%
		8. Prosentase kelulusan : a. Jenjang SD/SDLB	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	100% 100%
		9. Lulusan yang melanjutkan : a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB	100% 93,50%
		10. Rasio guru dengan siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	1:28 1:28 1:32
		11. Peningkatan sarana prasarana pendidikan : a. Ruang Kelas SD/SDLB baik b. Ruang Kelas SMP/SMPLB baik c. Ruang Kelas SMA/SMK/SMALB baik d. Ketersediaan Ruang Perpustakaan SD e. Ketersediaan Laboratorium IPA Lengkap SMP	90% 95% 98% 30% 100%
	3. Meningkatnya tata kelola dan pencitraan publik pendidikan (Kepastian/Keterjaminan Pendidikan)	1. Satuan pendidikan telah terakreditasi : a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	100% 100% 100%
		2. Satuan pendidikan dengan nilai akreditasi minimal B : a. Jenjang SD/SDLB b. Jenjang SMP/SMPLB c. Jenjang SMA/SMK/SMALB	100% 100% 100%
		4. SMK yang telah memiliki standar ISO 9001:2008	50%
		5. Jumlah regulasi tentang	10

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		biaya pendidikan	
<b>9.</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>		
	1. Meningkatnya perlindungan dan pemanfaatan aset budaya	1. Jumlah bangunan bersejarah yang dilindungi dengan perda	100%
		2. Jumlah event/pagelaran seni budaya tradisional yang diadakan	50
		3. Jumlah kelompok seni dan budaya yang terpelihara	519
<b>10.</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>		
	1. Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga.	1. Jumlah prestasi olahraga	25
		2. Jumlah kelompok kepemudaan berprestasi	12
	2. Meningkatnya kualitas penduduk usia produktif	1. Prosentase penduduk usia produktif yang memiliki kompetensi	85%
<b>11.</b>	<b>KEPERPUSTAKAAN</b>		
	1. Meningkatnya pelayanan keperpustakaan daerah	1. Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah	34.500
		2. Jumlah sekolah/tempat yang di singgahi perpustakaan keliling	50
		3. Jumlah koleksi bahan pustaka	37.500
<b>12.</b>	<b>KESEHATAN</b>		
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pencegahan dan peningkatan kualitas)	1. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	102
		2. Kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	8
		3. Prevalensi gizi buruk	0,10%
		6. Cakupan pelayanan gawat	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota	
		7. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	96%
		6. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%
		7. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	96%
		8. Cakupan pelayanan nifas	96%
		9. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100%
		10. Cakupan kunjungan bayi	95%
		11. Cakupan pelayanan anak balita	90%
		12. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%
		13. Cakupan peserta KB Aktif	85%
		14. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : a. Acute Falcid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun b. Pneumonia Balita c. Pasien baru TB BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penderita diare	100,00%  100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
		15. Usia harapan hidup (tahun)	72
		16. Memerangi HIV/AIDS dan	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		penyakit menular lainnya (MDG's)	
		17. Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten	75%
		18. Cakupan pelayanan pasien rawat jalan yang tertangani	85%
		19. Cakupan pelayanan pasien rawat inap yang tertangani	85%
		20. Pencapaian RSUD Saras Husada terakreditasi menjadi RSUD Tipe B-Pendidikan	75%
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan)	1. Cakupan desa siaga aktif	80%
		2. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%
		3. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan (bagi penduduk miskin)	1. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin (Peserta Askeskin)	80%
		2. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%
		3. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI usia 6-24 bulan bagi keluarga miskin	100%
<b>13.</b>	<b>KETAHANAN PANGAN</b>		
	1. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Prosentase cadangan pangan daerah	50%
		2. Rasio jumlah penduduk	93

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		terhadap jumlah kebutuhan pangan (ton/1000 penduduk)	
		3. Jumlah produksi padi/beras (ton)	357.888
		4. Jumlah desa rawan pangan (desa)	40
	2. Meningkatnya distribusi dan keterjangkauan bahan pangan	1. Prosentase kestabilan harga beras	100%
		2. Prosentase kemudahan akses distribusi pangan sampai ke tingkat keluarga	100%
	3. Meningkatnya konsumsi dan keamanan pangan	1. Prosentase jumlah gizi yang dikonsumsi/kapita/ hari (gizi=kalori, protein, vitamin, lemak, dan mineral yang dikonsumsi penduduk)	100%
<b>14.</b>	<b>PERTANIAN (Pilihan)</b>		
	1. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	1. Produktivitas lahan budidaya pertahun padi, palawija, dan hortikultura meningkat (ha/tahun)	72.500
		2. Produktivitas tenaga kerja bidang pertanian meningkat (orang/tahun)	72.500
	2. Penguatan kelembagaan pertanian dalam arti luas (kelompok tani)	1. Prosentase kelompok tani berbadan hukum (kelompok tani)	15
	3. Penguatan permodalan usaha pertanian dalam arti luas	1. Jumlah kelompok usaha pertanian dalam arti luas yang diberi permodalan (kelompok)	20
	4. Pembatasan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian	1. Luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian (ha)	11
	5. Meningkatnya	1. Jumlah jenjang kelompok	



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
	jenjang kelas kelompok tani	tani utama, madya, lanjutan, dan pemula : Pemula Lanjut Madya Utama	50% 50% 50% 5
	6. Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi pedesaan	1. Panjang jaringan irigasi pedesaan dalam kondisi baik (m)	252.952
	7. Meningkatnya produksi komoditas pertanian	1. Jumlah produksi padi (ton)	352.888
		2. Jumlah produksi jagung (ton)	37.073
		3. Jumlah produksi kedelai (ton)	5.470
	8. Meningkatnya produksi hasil ternak, populasi ternak, kelahiran IB, dan penanganan teknak sakit	1. Jumlah produksi daging (kg)	8.008.528
		2. Jumlah produksi telur (ton)	1.071.300
		3. Jumlah populasi ternak besar (ekor)	22.170
		4. Jumlah populasi ternak kecil (ekor)	267.108
		5. Jumlah populasi ternak unggas (ekor)	1.393.695
		6. Jumlah populasi aneka ternak (ekor)	3.829
		7. Jumlah kelahiran IB (ekor)	3.750
		8. Jumlah hewan sakit yang tertangani (ekor)	100%
		9. Jumlah penanganan pencegahan penyakit hewan (ekor)	100%
<b>15.</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN (Pilihan)</b>		
	1. Meningkatnya produksi tangkap nelayan Kab. Purworejo di 5 TPI	1. Jumlah produksi tangkap laut (ton)	62
	2. Meningkatnya	1. Jumlah produksi perikanan	1.370

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
	produksi perikanan budidaya	budidaya (ton)	
		2. Jumlah produksi benih ikan (ekor)	34.898.400
	3. Meningkatnya kualitas dan produksi pengolahan ikan	1. Jumlah pengolah ikan yang dibina (orang)	400
<b>16.</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>		
	1. Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah	1. Prosentase peningkatan jumlah investor	25% (431)
		2. Prosentase peningkatan nilai investasi	25%
		3. Jumlah perijinan investasi yang diterbitkan	405
<b>17.</b>	<b>PERDAGANGAN (pilihan)</b>		
	1. Meningkatnya jaringan pemasaran produk-produk lokal	1. Prosentase peningkatan transaksi produk lokal dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor perdagangan	23%
		2. Prosentase pertumbuhan ekspor	60%
	2. Meningkatnya nilai tambah produk-produk lokal	1. Prosentase rata-rata pertumbuhan PDRB	9,85%
<b>18.</b>	<b>INDUSTRI (Pilihan)</b>		
	1. Meningkatnya penggunaan pola agribisnis dan agroindustri dalam pengelolaan potensi pertanian	1. Prosentase pertumbuhan jumlah industri pengolahan hasil pertanian	15%
	2. Berkembangnya potensi daerah melalui pendekatan klaster dan kawasan	1. Prosentase peningkatan jumlah kluster yang terbentuk	30%
<b>19.</b>	<b>PARIWISATA (Pilihan)</b>		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
	1. Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	1. Prosentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan untuk sektor hotel dan restoran.	16%
		2. Kontribusi pariwisata terhadap PAD	6,19%
<b>20.</b>	<b>PEKERJAAN UMUM</b>		
	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain )	1. Prosentase jalan dengan kualitas baik	60%
		2. Prosentase jembatan dengan kondisi baik	74,1%
		3. Rasio layanan irigasi (Daerah Irigasi tercukupi)	67,4%
		4. Akses air bersih (dari 181 desa rawan air bersih tertangani)	88%
		5. Akses sanitasi (rumah tangga bersanitasi) (%)	80%
		6. Prosentase cakupan layanan air limbah	60%
		7. Prosentase cakupan layanan persampahan	60%
		8. Luas genangan air hujan/ banjir yang tertangani	30%
		9. Tingkat pengelolaan dan konservasi sumber daya air (3 Daerah Aliran Sungai)	35%
<b>21.</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT</b>		
		10. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90%
		11. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	86%
		12. Cakupan lingkungan yang	57%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		sehat dan aman yang didukung dengan PSU	
<b>22.</b>	<b>PENATAAN RUANG</b>		
	1. Meningkatnya kualitas penataan ruang	1. Jumlah perencanaan tentang Tata Ruang yang di Perdakan	5
		2. Tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	70%
<b>23.</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>		
	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih dan lain-lain )	1. Prosentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan sesuai kebutuhan	80%
		2. Prosentase sarana perhubungan dengan kondisi baik	70%
		3. Prosentase jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ sesuai kebutuhan	75%
<b>24.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>		
	1. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan)	1. Pencegahan pencemaran air	100%
		2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber yang tidak bergerak	100%
		3.	
		4. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi Biomassa	100%
		5. Pelayanan tindak lanjut pengaduan akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	100%
		6. Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan	25%
<b>25.</b>	<b>PERTANAHAN</b>		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
	1. Meningkatnya manajemen pengelolaan NJOP	1. Prosentase tanah yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi berupa sertifikat	35%
		2. Prosentase rata-rata pertumbuhan konstibusi pajak dari pertanahan (bumi dan bangunan) terhadap PAD	24%
<b>26.</b>	<b>KEHUTANAN (Pilihan)</b>		
	1. Meningkatnya pertumbuhan hutan rakyat dan konservasi sumber daya hutan	1. Luas hutan rakyat (ha)	41.009
		2. Luas lahan kritis (ha)	33.989
		3. Luas lahan pengembangan hasil hutan bukan kayu (ha)	175
<b>27.</b>	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Pilihan)</b>		
	1. Meningkatnya penggunaan pola pendanaan yang efisien, efektif sehingga memperkecil eksternalitas (tingkat pencemaran lingkungan)	1. Berkurangnya luas areal pertambangan yang dapat merusak lingkungan	(3467,75ha) 35%
	2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi listrik, sarana air bersih Dll)	1. Dusun tanpa akses listrik	5%
		2. Jumlah pemanfaatan energi alternatif baru terbarukan (unit)	14
		3. Prosentase rumah tangga dengan akses listrik	84%
<b>28.</b>	<b>OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN</b>		
	1. Optimalisasi pemanfaatan sumber- sumber pendapatan serta aset-aset pemerintah daerah	1. Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD, Bagi Hasil, Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan)	30%
	2. Optimalisasi kualitas	1. Prosentase bagian laba	25%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
	dan peran BUMD, koperasi dan UMKM	BUMD	
	3. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	1. Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik (Prosentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya)	90%
		2. Prosentase Aparatur Pemerintah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan SDM	85%
		3. Prosentase tingkat pendidikan aparat	90%
		4. Prosentase tingkat pelanggaran disiplin PNS	10%
		5. Prosentase aparat yang mendapatkan penghargaan	85%
		6. Prosentase penempatan aparat sesuai dengan kompetensinya	90%
		7. Prosentase Aparatur yang bebas dari Praktek KKN	100%
		8. Prosentase Tingkat disiplin dan etos kerja Aparatur	100%
		9. Prosentase Tingkat tertib administrasi kepegawaian	95%
	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1. Prosentase SKPD yang menyusun LAKIP	100%
		2. Prosentase SKPD yang predikat akuntabilitas baik	20%
	5. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar SKPD/instansi sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	1. Prosentase kesesuaian bentuk lembaga perangkat daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
		2. Prosentase efektifitas mekanisme dan tata hubungan kerja lembaga perangkat daerah/instansi	100%
	6. Meningkatnya tertib	1. Prosentase SKPD yang	20%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
	administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	menerapkan SPM	
		2. Prosentase SKPD yang memiliki SOP	20%
		3. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang sudah memiliki IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	12
		4. Berkurangnya tindak komplain masyarakat terhadap pelayanan publik (melalui SPK dan SMS)	40
	7. Meningkatnya mekanisme dan tata hubungan antar eksekutif dan legislatif sehingga mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.	1. Jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan kerjasama aktif Pemerintah Daerah dan DPRD	20
		2. Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu (dead line 31 Des T.A sebelumnya)
	8. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1. Prosentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK	WDP
	9. Optimalisasi fungsi kecamatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Prosentase tertib administrasi kecamatan dan desa (terkoordinasinya kecamatan dan desa; terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kecamatan); (ketersediaan prioritas pembangunan wilayah; terfasilitasinya penyusunan APBDesa; terkendalikannya pelaksanaan APBDesa; terfasilitasinya pemenuhan/penanganan target pembayaran PBB, IMB, SP3; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan wilayah); dan (terjaganya kondusifitas	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		ketertiban dan keamanan wilayah; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)	
	10. Optimalisasi fungsi kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	1. Prosentase tertib administrasi kelurahan (terlayannya masyarakat untuk administrasi pemerintahan kelurahan); (ketersediaan prioritas pembangunan kelurahan; terfasilitasi dan terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan kelurahan); dan (terjaganya kondusifitas ketertiban dan keamanan kelurahan; terfasilitasi dan terbinanya kegiatan pemberdayaan masyarakat)	100%
	11. Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1. Tingkat ketersediaan produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	100%
	12. Optimalisasi fungsi konstruktif pengawasan	1. Prosentase jumlah kasus yang tertangani	100%
		2. Prosentase pengembalian kerugian negara/daerah ke Kas negara/daerah	100%
<b>29.</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>		
	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat di pemilu	1. Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (PILPRES, PILLEG, PILKADA)	60%
	2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat	1. Prosentase penanganan pelanggaran peraturan perda dan perbup	100%
		2. Prosentase penangan	100%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		konflik yang terjadi di masyarakat	
	3. Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah kabupaten dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana	1. Prosentase pelayanan penanggulangan bencana alam	100%
<b>30.</b>	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>		
	1. Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan meliputi perencanaan pembangunan pada tingkat makro maupun mikro serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah	1. Rasio rencana pembangunan yang terealisasi	100%
		2. Rasio rencana dengan kompetensi standar	100%
		3. Prosentase efisiensi kinerja SKPD	100%
		4. Prosentase efektivitas kinerja SKPD	95,00%
<b>31.</b>	<b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>		
	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	1. Lamanya waktu yang diperlukan untuk pelayanan kependudukan (hari) :	
		a. KK b. KTP c. Pindah Datang d. Akte Kelahiran e. Akte Kematian f. Keterangan Lahir Mati g. Akte Perkawinan h. Akte Perceraian i. Pengakuan anak j. Pengesahan Anak k. Perubahan Nama l. Perubahan Status Kewarganegaraan m. Pembatalan Perkawinan n. Pembatalan Perceraian	2 1 1 14 12 12 12 12 12 12 18 18 12 12
		2. Prosentase Penduduk yang	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	2	3	4
		memiliki KTP	
		3. Prosentase Kepemilikan akta kelahiran	100%
		4. Prosentase terpeliharanya data base kependudukan	100%
<b>32.</b>	<b>STATISTIK</b>		
	1. Peningkatan ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan	1. Prosentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan	100%
<b>33.</b>	<b>KEARSIPAN</b>		
	1. Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal	1. Jumlah berkas (dokumen/arsip negara) yang dikelola dengan baik	35.000
<b>34.</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		
	1. Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintah dan pembangunan daerah	1. Prosentase pem-publish-an data dan informasi pemerintahan dan pembangunan yang akurat dan terbaru	100%
		2. Jumlah Sistem Informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis TI	20
		3. Prosentase SKPD yang memiliki jaringan berbasis LAN	100%
		4. Prosentase pengendalian tower telekomunikasi	100%

Program	Aggaran (Rp.)
---------	---------------

1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.778.346.872
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	3.812.465.700
3.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.377.228.700
4.	Peningkatan Disiplin Aparatur	206.250.000
5.	Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah	655.014.200
6.	Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa	1.212.016.450
7.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kelurahan	2.105.608.950
8.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.376.103.000
9.	Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan	700.279.600
10.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	2.398.172.950
11.	Pendidikan Anak Usia Dini	1.749.873.800
12.	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	37.834.075.600
13.	Pendidikan Menengah	19.574.048.500
14.	Pendidikan Non Formal	174.197.100
15.	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.057.988.400
16.	Manajemen Pelayanan Pendidikan	4.264.517.110
17.	Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.229.463.500
18.	Upaya Kesehatan Masyarakat	3.310.899.217
19.	Pengawasan Obat dan Makanan	54.192.000
20.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	257.085.000
21.	Perbaikan Gizi Masyarakat	1.204.353.000
22.	Pengembangan Lingkungan Sehat	1.319.687.000
23.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	685.935.000
24.	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	280.000.000
25.	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	5.143.035.300
26.	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1.874.561.955
	Program	Aggaran (Rp.)

27.	Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	18.000.000.000
28.	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	97.500.000
29.	Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	25.000.000
30.	Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	460.882.000
31.	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	99.587.350.200
32.	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.220.000.000
33.	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	63.169.143.400
34.	Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	37.987.500
35.	Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	50.000.000
36.	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	5.584.287.300
37.	Pembangunan infrastruktur perdesaaan	3.966.866.000
38.	Pengelolaan Kebersihan, Pertamanan, Penerangan Jalan	8.746.388.600
39.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.923.812.500
40.	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	7.882.647.800
41.	Pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	8.065.366.000
42.	Pengendalian banjir	2.356.001.850
43.	Pengembangan Perumahan	614.780.000
44.	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	500.000.000
45.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	630.222.300
46.	Perencanaan Tata Ruang	586.800.000
47.	Pengembangan data/informasi	102.594.500
48.	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	249.145.000
49.	Perencanaan pembangunan daerah	942.323.500
50.	Perencanaan pembangunan ekonomi	329.440.000
51.	Perencanaan sosial budaya	266.956.000
52.	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	76.410.000
	Program	Aggaran (Rp.)

53.	Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	163.070.000
54.	Penelitian dan Pengembangan	146.375.000
55.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.796.838.500
56.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	695.267.100
57.	Peningkatan pelayanan angkutan	519.685.800
58.	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	267.231.200
59.	Pengamanan dan pengendalian lalu lintas	1.733.714.800
60.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	481.200.000
61.	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	836.161.200
62.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	513.068.800
63.	Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup	20.000.000
64.	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	624.321.700
65.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	300.000.000
66.	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	207.678.000
67.	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	45.159.000
68.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.595.357.800
69.	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1.339.561.200
70.	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	147.096.900
71.	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	160.635.000
72.	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	184.646.800
73.	Keluarga Berencana	2.376.205.750
74.	Kesehatan Reproduksi Remaja	41.000.000
75.	Pelayanan kontrasepsi	272.613.000
76.	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	78.000.000
77.	Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	38.070.000
78.	Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	32.000.000
	Program	Aggaran (Rp.)

79.	Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	28.000.000
80.	Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	33.800.000
81.	Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	30.600.000
82.	Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	23.500.000
83.	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	156.312.400,00
84.	Pembinaan panti asuhan/ panti jompo	35.283.800,00
85.	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	948.284.000,00
86.	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.672.803.900
87.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	851.231.300
88.	Peningkatan Kesempatan Kerja	1.649.759.900
89.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	364.523.100
90.	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	36.326.800
91.	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	457.010.100
92.	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	438.064.000
93.	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	125.039.000
94.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	158.363.600
95.	Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	6.000.000
96.	Pengembangan Nilai Budaya	911.962.300
97.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	355.702.950
98.	Pengelolaan Keragaman Budaya	1.036.317.100
99.	Peningkatan peran serta kepemudaan	119.570.000
100.	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	572.382.700
101.	Pembinaan Kepemudaan	330.959.500
102.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.080.113.700
103.	Pengembangan wawasan kebangsaan	224.370.000
104.	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	45.450.000
	Program	Aggaran (Rp.)

105. Pendidikan politik masyarakat	136.950.000
106. Pemeliharaan Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	690.877.400
107. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	3.275.335.200
108. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	2.036.827.300
109. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	18.985.900
110. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	119.921.000
111. Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.037.675.000,00
112. Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah	680.970.600
113. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	119.405.000
114. Peningkatan Koordinasi SKPD	2.454.271.800
115. Pengembangan Kebijakan Pemerintah	1.408.145.450
116. Penataan Kelembagaan Daerah	78.146.000
117. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan	190.000.000
118. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	10.523.745.100
119. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.053.093.400
120. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	357.944.500
121. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	25.797.500
122. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.870.410.000
123. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	292.221.000
124. Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	94.090.000
125. fasilitas pindah/purna tugas PNS	101.900.000
126. Program Pendidikan Kedinasan	2.430.033.000
127. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	834.650.000
128. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.904.600.000
129. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	854.348.400
130. Pengembangan data/informasi/statistik daerah	295.300.000

Program	Aggaran (Rp.)
131. Perbaikan sistem administrasi kearsipan	50.760.000
132. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	382.077.000
133. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	28.830.000
134. Peningkatan kualitas pelayanan informasi	287.668.000
135. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.376.103.000
136. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	69.287.700
137. Kerjasama informasi dan media massa	132.853.800
138. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	202.828.800
139. Peningkatan Ketahanan Pangan	2.861.662.300
140. Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.642.805.000
141. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	322.000.000
142. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	404.000.000
143. Peningkatan produksi hasil peternakan	957.425.000
144. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	156.200.000
145. Peningkatan penerapan teknologi peternakan	1.642.805.000
146. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	8.987.960.300
147. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	3.703.496.350
148. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	2.139.661.800
149. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	515.651.734
150. Rehabilitasi hutan dan lahan	1.021.150.216
151. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	1.974.788.150
152. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	56.175.000
153. Perencanaan dan pengembangan hutan	58.000.000
154. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	57.735.000
155. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	7.364.770.000
156. Penumbuhan Sumber-Sumber Energi Baru Terbarukan	496.620.000



Program	Aggaran (Rp.)
157. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	658.820.400
158. Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.523.934.700
159. Pengembangan Kemitraan	385.279.000
160. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	75.000.000
161. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	42.520.000
162. Pengembangan budidaya perikanan	901.978.700
163. Pengembangan perikanan tangkap	4.082.185.000
164. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	80.000.000
165. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	1.189.220.700
166. Deseminasi Teknologi Perikanan	71.900.000
167. Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	444.631.000
168. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	5.603.991.700
169. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	77.677.500
170. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	392.969.780
171. Penumbuhan Industri Berbasis Sumber Daya Lokal	403.106.000
172. Pengembangan Wilayah Transmigrasi	304.023.000

Purworejo,       Maret 2015

BUPATI PURWOREJO

Drs. H. MAHSUN ZAIN, M.Ag

